



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, perlu dikembangkan budaya sadar hukum yang salah satunya melalui penetapan desa/kelurahan sadar hukum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Bupati sebelum mengusulkan desa/kelurahan binaan sadar hukum kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum terlebih dahulu melakukan penetapan desa/kelurahan binaan sadar hukum dan melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan binaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tahun 2023, dengan daftar Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pembinaan secara terus menerus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

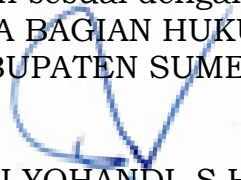
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN
SADAR HUKUM TAHUN 2023.

DAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2023

NO	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
1	Wado	1.	Desa Cimungkal
		2.	Desa Cilengkrang
		3.	Desa Cikareo Selatan
		4.	Desa Wado
		5.	Desa Sukajadi
2.	Darmaraja	6.	Desa Darmaraja
		7.	Desa Darmajaya
		8.	Desa Sukaratu
		9.	Desa Cikeusi
		10.	Desa Cipeuteuy
		11.	Desa Cieunteung
		12.	Desa Neglasari
		13.	Desa Tarunajaya
		14.	Desa Ranggon
3.	Cibugel	15.	Desa Jayamekar
		16.	Desa Cibugel
		17.	Desa Sukaraja
4.	Conggeang	18.	Desa Cibeureuyeuh
5	Buahdua	19.	Desa Hariang
6	Tanjungsari	20.	Desa Kadakajaya
7.	Sukasari	21.	Desa Genteng
		22.	Desa Banyuresmi
		23.	Desa Nanggerang
8.	Pamulihan	24.	Desa Cigendel
		25.	Desa Cijeruk
		26.	Desa Haurngombong
9.	Cimanggung	27.	Desa Cimanggung

NO	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		28.	Desa Sindangpakuon
		29.	Desa Sindanggalih
		30.	Desa Cikahuripan
		31.	Desa Sukadana
		32.	Desa Pasirnanjung
11.	Jatinangor	33.	Desa Hegarmanah
		34.	Desa Cibeusi
		35.	Desa Cipacing
		36.	Desa Mekargalih
		37.	Desa Cintamulya
		38.	Desa Jatimukti
		39.	Desa Cisempur
		40.	Desa Jatiroke
		41.	Desa Cileles
		42.	Desa Cilayung
12.	Rancakalong	43.	Desa Nagarawangi
		44.	Desa Pangadegan
		45.	Desa Sukahayu
		46.	Desa Sukamaju
		47.	Desa Pamekaran
		48.	Rancakalong
		49.	Desa Sukasirnarasa
13.	Sumedang Selatan	50.	Kel. Pasanggrahan Baru
		51.	Kel. Regol Wetan
		52.	Desa Citengah
		53.	Desa Ciherang
14.	Sumedang Utara	54.	Kelurahan Talun
		55.	Desa Padasuka
		56.	Desa Jatihurip
		57.	Desa Jatimulya
		58.	Desa Rancamulya
15.	Tanjungkerta	59.	Desa Boros
16.	Ujungjaya	60.	Desa Palasari
		61.	Desa Sakurjaya
		62.	Desa Sukamulya
		63.	Desa Cipelang

NO	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		64.	Desa Cibuluh

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001